

Pemilih "Hijau" di Kota Santri: Kasus Pemilu 2004 di Pekalongan

Oleh:
M. Hamdan Basyar

Abstract

The victory of the political party that carries the Islamic symbol or well known as the "green" (this is not to be confused with the green politics in ecological term) in the 2004 election in Pekalongan Regency, can not directly be implied that they will propose the "green" symbol (it is just like Islamic sharia, etc). The Pekalongan people and their influential leaders are more pragmatic to their interests than imposing the "green" politics. Furthermore, the Green didn't absolutely win in the local parliament. It has only a few more number than the "red" and "yellow" symbols. This means that the Green solidity is still questioned. A similar event of 2001 -when the election of the Mayor and the Deputy of Mayor was taken place- could happen again. In that time the Green was fragmented, fighting with their own individual or party interests. Therefore, the Pekalongan people needs to prove that their city deserve a called "the Santri City" -a city of Islamic scholar-. The victory of the political party with the Green symbol doesn't have any effect yet, without real implementation in their daily life.

Pendahuluan

Selama ini, Pekalongan dikenal dan dilabel sebagai "kota santri," kota yang biasanya dilambangkan dengan warna hijau. Simbolisasi warna hijau pada masa Orde Baru dapat dikaitkan dengan "militer" atau "Islam". Di Pekalongan warna hijau dikaitkan dengan keislaman atau kesantrian.

Soal warna mewarnai, pada masa Orde Baru, adalah hal yang sensitif setiap menjelang pemilihan umum (pemilu). Pada pemilu tahun 1997, misalnya, di Jawa Tengah muncul apa yang dinamakan sebagai "kuningisasi".¹ Waktu itu, berbagai hal, seperti: pagar rumah, pintu toko, pepohonan, dan hal lain di tempat umum, dicat warna kuning. Hal ini berkaitan dengan kampanye Golongan Karya (Golkar) yang menggunakan warna kuning sebagai simbol dalam pemilu.

Kuningisasi ini hampir menyeluruh di Jawa Tengah, tidak terkecuali di wilayah Pekalongan. Hanya saja, di kota santri ini, ada penentangan terhadap simbol kuning. Kerusuhan massa di Pekalongan menjelang pemilu 1997 adalah salah satu wujud

penolakan dominasi warna kuning yang melambangkan Golkar.² Masyarakat Pekalongan tidak begitu menyukai penguasa Golkar. Begitu kesalnya terhadap hal yang berbau Golkar, semua yang berwarna kuning tidak disukai. Di daerah Buaran, misalnya, lampu lalu lintas (*traffic light*) yang berwarna merah, kuning, dan hijau, tidak dapat berfungsi dengan benar. Lampu kuning sengaja dipecahkan/dirusak. Sementara merah dan hijau tidak dirusak.³ Tidak itu saja, pada waktu sekitar kampanye pemilu 1997, *tahu* (makanan dari bahan kedelai) yang biasanya berwarna kuning ditolak (tidak diberi warna). Bahkan, pada masa kampanye pemilu, pernah terjadi petugas kebersihan yang memakai baju kuning diminta melepas bajunya. Pertanyaannya adalah apakah benar Pekalongan adalah kota santri yang pemilihnya benar-benar memilih "warna hijau" dalam pemilihan umum? Hal ini menarik untuk diperhatikan, karena banyak kalangan yang *taken for granted* bahwa

² Lihat M. Hamdan Basyar, *Ulama dan Kekerasan Politik: Kasus Pemilu 1997 dan 1999 di Pekalongan*. (Depok: Hamra Pustaka, 2004).

³ Ketika penulis mengadakan penelitian tentang "Kerusuhan di Pekalongan" (Oktober 1997), lampu lalu lintas tersebut masih tetap dibiarkan rusak.

¹ Warna kuning adalah simbol dan lambang Golongan Karya (Golkar).

Pekalongan adalah kota santri yang memperoleh predikat "hijau".

Wajah Pekalongan

Nama "Pekalongan" bisa mengacu pada Kabupaten Pekalongan atau Kota Pekalongan. Sebelum lahir Kota Pekalongan, kedua daerah ini dalam satu wilayah, yaitu Kabupaten Pekalongan. Pada saat ini, secara *de jure*, kedua wilayah itu telah terpisah. Kota Pekalongan dipimpin oleh seorang Walikota dan Kabupaten Pekalongan dipimpin oleh seorang Bupati. Sejak Agustus 2001, ibukota Kabupaten Pekalongan dipindahkan ke wilayah selatan, suatu wilayah yang dekat dengan pegunungan, yaitu di Kecamatan Kajen. Secara bertahap, beberapa kantor dinas dipindahkan ke pusat pemerintahan baru tersebut.

Sebelum diputuskan wilayah mana yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Pekalongan, ada tarik menarik kepentingan. Sekelompok masyarakat menginginkan pusat pemerintahan berada di wilayah pantai, yakni di Kecamatan Wiradesa. Mereka berpendapat, bahwa wilayah ini mudah dikembangkan, karena terletak di jalur pantura (pantai utara) Jawa yang dilalui oleh lalu lintas dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Mengingat kepentingan ini, maka sebagian kantor dinas Kabupaten Pekalongan membangun kantor baru di Kecamatan Wiradesa. Akan tetapi pada perkembangan berikutnya, ada sekelompok masyarakat lain yang menginginkan pusat pemerintahan Kabupaten Pekalongan berada di daerah selatan (pegunungan). Alasan yang mereka kemukakan adalah untuk pengembangan wilayah baru dan sekaligus menghidupkan wilayah tengah. Mereka juga beralasan, bahwa pusat pemerintahan di Kecamatan Wiradesa kurang membantu pengembangan wilayah lain, terutama wilayah pegunungan. Tanpa pusat pemerintahan berada di sana, Kecamatan Wiradesa akan berkembang dengan cepat, karena terletak di pantura. Setelah melalui pembahasan yang mendalam, akhirnya DPRD II Kabupaten

Pekalongan memilih Kecamatan Kajen sebagai pusat pemerintahan yang baru.

Nama Pekalongan berasal dari kata "kalong" yang berarti kelelawar. Konon, pada masa dahulu, ada seorang pendekar yang bertapa dengan cara "ngalong" (seperti kelelawar). Ketika bertapa sang tokoh ini menggantungkan kakinya di pohon, sementara itu kepalanya menggantung ke bawah. Cara itu persis seperti "kalong" sedang tidur. Dia melakukan cara "ngalong" tersebut untuk menambah ke saktiannya. Kabar bertapa "ngalong" itu kemudian menyebar ke wilayah sekitarnya. Maka, berdatanganlah orang-orang yang ingin tahu cara bertapa "ngalong" dan mereka berguru di sana. Kemudian tempat pertapaan itu disebut sebagai "Pekalongan" (tempat bertapa dengan cara "ngalong").

Cerita lain yang beredar adalah bahwa pada suatu ketika Baurekso menjadi Bupati Pekalongan dan juga sebagai Tokoh Panglima Kerajaan Mataram. Karena mendapat perintah dari Sultan Agung untuk menyerang kompeni di Batavia kurang lebih tahun 1628, maka ia berjuang keras bahkan diawali dengan bertapa seperti kalong/kelelawar. Pertapaannya di hutan gambiran (sekarang: kampung Gambaran). Dalam bertapa Ki Baurekso digoda dan diganggu prajurit siluman utusan Dewi Lanjar, namun tidak berhasil bahkan Dewi Lanjar dipersunting Baurekso sebagai isterinya.

Nama Pekalongan juga berasal dari kata Apek dan Along (bahasa Jawa: apek (mencari), along (banyak) ini berkaitan dengan perairan laut yang kaya hasil ikannya.

Kebenaran cerita asal muasal nama Pekalongan belum terbukti secara ilmiah. Akan tetapi cerita yang beredar di tengah masyarakat adalah demikian adanya.

Dari Pemilu ke Pemilu

Pekalongan dianggap "hijau" bisa jadi ada benarnya bila melihat sebagian hasil pemilu di Kota Pekalongan. Pada masa Orde Baru, masyarakat Kota Pekalongan lebih mendukung PPP dibandingkan dengan Golkar maupun PDI. Pendukung PPP kebanyakan berasal dari

Ormas NU. PPP maupun NU menggunakan warna "hijau" sebagai simbol mereka.

Tetapi kemudian pemimpin NU (di bawah kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid) mengatakan, bahwa NU tidak berpolitik praktis.⁴ Mereka dapat menyalurkan aspirasi politiknya di PPP, Golkar, maupun PDI. Kebijakan pemimpin NU ini membingungkan masyarakat. Mereka tidak mengerti dan tidak memahami kebijakan ini. Mereka tetap berpendapat, NU adalah hijau dan pendiri PPP, maka orang NU harus mendukung PPP. Oleh karena itu, mereka tidak senang pada Golkar. Aparat pemerintah yang dianggap membela Golkar ikut dibenci.

Hal itu, misalnya, ditunjukkan pada pemilu 1997. Di Kota Pekalongan, perolehan suara terbesar diraih oleh PPP. Kemenangan partai berlambang bintang ini bukan yang pertama kalinya. Pada pemilu 1992, PPP juga mendapatkan kursi DPRD II terbanyak. Perbandingan perolehan kursi DPRD II pada pemilu 1987, 1992, 1997, dan 1999 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Kursi Anggota DPRD II Kota Pekalongan

PARTAI	1987	1992	1997	1999
PPP	5	8	12	7
Golkar	8	7	8	3
PDI	3	4	0	0
TNI/Polri	4	5	5	3
PDI-P				9
PKB				5
PAN				2
PBB				1
Jumlah	20	24	25	30

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Dari tabel tersebut terlihat bahwa masing masing partai mengalami naik turunnya perolehan suara dalam pemilu dan kursi DPRD II. Pada pemilu 1987, suara terbesar diperoleh Golkar dengan 8 kursi. Sementara PPP memperoleh 5 kursi dan PDI memperoleh 3 kursi. Beberapa kalangan menjelaskan,⁵ bahwa kalahnya

PPP pada tahun itu karena adanya "penggembosan" yang dilancarkan oleh kalangan *Nahdhatul Ulama* (NU). Padahal NU menjadi "tulang punggung" PPP di Pekalongan. Pada tahun 1992, PPP memperoleh 8 kursi; Golkar 7 kursi; dan PDI 4 kursi. Pemilu 1992 menempatkan PPP di atas Golkar. Hal ini dikarenakan tidak ada lagi "penggembosan" dari kalangan NU. Pada pemilu tahun 1997, PDI terpuruk. Konflik internal PDI pusat berimbas ke daerah. Partai berlambang Kepala Banteng yang memang kecil ini tidak mendapatkan satu kursi pun di DPRD II Kota Pekalongan. Mereka kehilangan 4 kursi perwakilan yang diperolehnya pada pemilu 1992. Kondisi PDI tersebut menguntungkan PPP dan Golkar. Hasil pemilu menunjukkan, PPP menambah perolehan kursi menjadi 12 dan Golkar menambah satu menjadi 8 kursi.

Walaupun PPP mengungguli Golkar dalam pemilu di Kota Pekalongan, tetapi selama Orde Baru tokoh-tokoh PPP tidak pernah menduduki jabatan eksekutif (Walikota). Bahkan Ketua DPRD Kota Pekalongan, selalu dipegang fraksi TNI/Polri.

Pada masa reformasi, ketika diperkenalkan sistem multipartai, maka berbagai partai politik bermunculan. Pemilu 1999 telah mengubah komposisi anggota DPRD II Kota Pekalongan. Berdasarkan perolehan suara dalam pemilu 7 Juni 1999, maka komposisi anggota DPRD II Kota Pekalongan adalah: PDI Perjuangan (9 kursi), PPP (7 kursi), PKB (5 kursi), Partai Golkar (3 kursi), PAN (2 kursi), PBB (1 kursi), dan Fraksi TNI/Polri

tidak berpartai, tidak lagi ikut PPP, tetapi ikut Golkar. Jadi khittah adalah ikut Golkar. NU tidak berdaya untuk menyampaikan kepada masyarakat apa sebenarnya khittah itu. Ketidakberdayaan NU itu, karena kiai-kiai NU sudah "dikekepi" oleh Golkar dan diberi fasilitas macam-macam. Misalnya, tanah yang digunakan untuk kantor cabang NU Pekalongan (yang terletak di Bebekan, Paesan). Tanah itu milik pemerintah yang diserahkan kepada NU dan pemerintah memberikan fasilitas sampai berdirinya kantor.

¹ Hal ini yang biasa disebut sebagai NU kembali ke khittah 1926.

⁵ Menurut tokoh PPP Kab. Pekalongan, khittah NU yang dilancarkan sejak 1984 dimanfaatkan untuk "menggembosi" PPP. Khittah itu diartikan

(3 kursi).⁶ Ada pergeseran tingkat perolehan kursi. PDI-P mengungguli PPP dan Golkar.

Dengan slogan “pembela wong cilik”, PDI-P berhasil mengalahkan dominasi PPP. Selain faktor PDI-P yang berhasil menggalang kekuatan massa bawah dan kaum muda, merosotnya perolehan PPP itu juga tidak terlepas dari berdirinya PKB. Partai yang berbasis massa NU ini telah menyedot massa yang sebelumnya mendukung PPP. Bila perolehan kursi PPP dan PKB pada pemilu 1999 digabung, maka akan berjumlah 12 kursi, suatu jumlah yang sama dengan perolehan kursi PPP dalam pemilu 1997. Jumlah tersebut di atas perolehan PDI-P (9 kursi). Hal itu dapat diartikan, bahwa masyarakat Kota Pekalongan tetap memilih partai politik yang mempunyai afiliasi kuat dengan massa NU.

Dengan kondisi seperti di atas, maka wajarlah bila kota Pekalongan dilabeli dengan warna “hijau”. Walaupun pada pemilu 1999, kursi terbanyak diperoleh PDI-P (9 kursi), tetapi bila kursi PPP dan PKB digabungkan, maka jumlah kursi “hijau” menjadi 12 kursi, suatu jumlah yang terbanyak.

Berbeda dengan Kota Pekalongan, di Kabupaten Pekalongan, selama Orde Baru, warna “hijau” tidak pernah menjadi juara. PPP tidak pernah menang dibandingkan perolehan Golkar. Sampai pemilu 1997, Golkar selalu mengungguli parpol yang lain. Tetapi dalam pemilu masa reformasi, Golkar mengalami penurunan yang cukup drastis. PPP juga mengalami nasib yang sama. Dari 15 kursi yang diperoleh dalam pemilu 1997, PPP tinggal memperoleh 4 kursi dalam pemilu 1999.⁷ Secara terinci dapat dilihat dalam Tabel 2 berikut.

⁶ Di Kota Pekalongan, partai politik yang ikut pemilu 1999 berjumlah 33 partai. Dari jumlah itu, hanya enam partai yang mendapatkan kursi DPRD II. Sedangkan Fraksi TNI/Polri diangkat.

⁷ Di Kabupaten Pekalongan, partai politik peserta pemilu 1999 berjumlah 30 partai. Dari jumlah itu, yang memperoleh kursi DPRD II hanya enam partai. Fraksi TNI/Polri tidak dipilih.

Tabel 2. Jumlah Kursi Anggota DPRD II Kabupaten Pekalongan

PARTAI	1992	1997	1999
PPP	9	15	4
Golkar	18	20	4
PDI	9	1	0
TNI/Polri	9	9	5
PDI-P			17
PKB			10
PAN			4
PNI Massa Marhaen			1
Jumlah	45	45	45

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Kekalahan PPP di Kabupaten Pekalongan, selama Orde Baru itu, sangat berhubungan dengan ulah aparat pemerintah yang membela dan mendukung Golkar. Wilayah Kabupaten Pekalongan yang cukup luas menyulitkan aktivitas partai di pelosok desa. Peraturan kepartaian yang melarang pengurus partai di tingkat kecamatan mempersempit ruang gerak partai politik. Sebaliknya, Golkar menggunakan aparat pemerintah sampai ke tingkat yang paling bawah (desa) untuk menggalang kekuatannya. Akibatnya di daerah terpencil, partai politik (baik PPP maupun PDI) tidak pernah memperoleh kemenangan. Selama Orde Baru, kekuatan Golkar selalu dominan di wilayah Kabupaten Pekalongan bagian selatan (wilayah pedesaan dan pegunungan).

Pertambahan perolehan kursi PPP⁸ pada pemilu 1997 lebih disebabkan karena faktor PDI yang dilanda masalah internal partai.⁹ Pada waktu kampanye menjelang pemilu 1997, di Jawa Tengah dikenal simbol Mega-Bintang yang menyebabkan

⁸ Di DPRD II Kab. Pekalongan dari 9 kursi (1992) menjadi 15 kursi (1997) dan di DPRD II Kota Pekalongan dari 8 kursi (1992) menjadi 12 kursi (1997).

⁹ Kongres PDI di Medan (1996) yang menghasilkan DPP pimpinan Suryadi mendapatkan tantangan dari kelompok Megawati. Hal itu kemudian berlanjut dengan adanya “penguasaan” kantor DPP PDI di Jakarta oleh sekelompok simpatisan PDI yang tidak puas (PDI di bawah Megawati). Dan “penguasaan” itu berakhir dengan adanya penyerbuan kantor DPP oleh sekelompok orang (PDI di bawah Suryadi). Peristiwa itu kemudian dikenal dengan peristiwa 27 Juli 1996.

sebagian pengikut PDI memilih PPP.¹⁰

Sementara itu, merosotnya perolehan PPP pada pemilu 1999, baik di Kota maupun Kabupaten Pekalongan, tidak terlepas dari berdirinya PKB. Partai yang berbasis massa NU ini telah menyedot massa yang sebelumnya mendukung PPP. Pada waktu kampanye menjelang pemilu 1999, kedua partai yang didukung oleh kalangan NU itu saling bentrok. Mereka berebut untuk memperoleh dukungan dari massa NU. Akibat bentrokan itu, beberapa mobil dan rumah terbakar. Mobil milik PPP dan rumah tinggal mantan Ketua DPC PPP Kabupaten Pekalongan, Abdurrahman Thobari, terbakar. Beberapa orang mengungsi, karena takut dikejar pihak lawan.

Kerusuhan pada tahun 1999 itu mengingatkan kerusuhan pada tahun 1997, ketika terjadi bentrokan antara pendukung PPP dan pendukung Golkar yang kemudian merembet menjadi kerusuhan massal dan pembakaran. Dua kejadian kerusuhan itu terjadi menjelang pemilu. Hal ini mengindikasikan, bahwa masyarakat Pekalongan begitu rentan terhadap masalah yang berhubungan dengan politik. Mereka dengan mudah dapat diprovokasi untuk melakukan suatu pengrusakan.¹¹

Kondisi masyarakat Pekalongan yang cepat meledak itu menimbulkan sebutan, bahwa wilayah mereka adalah “sumbu pendek”. Istilah itu dikaitkan dengan

pengertian dalam “sumbu petasan”, “sumbu granat”, atau yang sejenisnya. Bila sumbu itu panjang, maka petasan atau granat tidak cepat meledak. Sebaliknya, bila sumbu itu pendek, maka petasan segera akan meledak begitu ada pemicunya.

Bila pemilu tahun 1999 dijadikan acuan untuk mengukur peta kekuatan politik di Kota Pekalongan, maka PDI-P menempati posisi teratas, seperti diterangkan di atas. PDI-P unggul di tiga kecamatan: Barat, Utara, dan Timur. PPP yang menempati posisi kedua, berjaya di Kecamatan Pekalongan Selatan. Secara terinci perolehan suara enam partai politik teratas adalah sebagaimana dalam Tabel 3. Dari Tabel 3 terlihat bahwa di Pekalongan Selatan (tempat terjadinya kekerasan politik), jumlah suara yang diperoleh PPP dan PKB hampir seimbang. Seperti disebutkan sebelumnya, kedua partai politik inilah yang saling bentrok ketika terjadi kampanye pemilu tahun 1999. Bila dilihat lebih terinci lagi di lima kelurahan (Kelurahan Kradenan, Banyurip Alit, Banyurip Ageng, Buaran, dan Jenggot) yang menjadi ajang persaingan nyata, maka PPP memenangkan suara di tiga kelurahan dan PKB memenangkan di dua kelurahan.

Persaingan kedua kelompok itu menarik untuk diperhatikan. Mereka pada pemilu tahun 1997 tampak dalam satu wadah, yakni PPP. Akan tetapi kemudian sebagian dari mereka memilih wadah lain pada pemilu tahun 1999. Pergeseran orientasi politik mereka terlihat pada Tabel 4.

Pada pemilu tahun 1999, PPP mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bahkan di dua kelurahan, yakni Banyurip Alit dan Banyurip Ageng, PPP mengalami kekalahan dari PKB. Pada pemilu tahun 1999 itu, PDI-P unggul di Kota dan Kabupaten Pekalongan, karena adanya bentrokan PPP dan PKB. Kaum muda kedua partai berbasis NU tersebut merasa kecewa dan mereka kemudian memilih PDI-P.

¹⁰ Mega-Bintang dipakai untuk melambangkan “bersatunya” kepentingan politik PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri yang tidak direstui oleh penguasa Orde Baru dan kepentingan politik PPP. Istilah itu, semula dilontarkan oleh Ketua DPC PPP Surakarta, Mudrick Setyawan Sangidoe. Pada waktu itu, ia menggagas dan menghimbau simpatisan PDI Mega untuk memilih PPP dalam pemilu 1997. Kondisi di Surakarta itu kemudian berimbas ke wilayah Jawa Tengah lainnya, termasuk Pekalongan. Bahkan kemudian fenomena Mega-Bintang ikut terhembus ke Jakarta. Lihat antara lain *Tempo Interaktif* (Edisi 10/02 - 10/Mei/97 dan Edisi 11/02 - 17/Mei/97).

¹¹ Lihat kembali M. Hamdan Basyar, *Ulama dan Kekerasan Politik.....*, hlm. 132-184.

Tabel 3. Perolehan Suara Enam Partai Politik Pada Pemilu 1999 Di Kecamatan Kota Pekalongan

Partai	Kecamatan				Jumlah
	Barat	Utara	Timur	Selatan	
PDI-P	14.583	14.815	12.422	4.988	46.808
PPP	11.917	8.505	9.200	9.626	39.248
PKB	7.202	3.397	4.489	8.666	23.754
P.Golkar	5.540	4.849	2.984	849	14.222
PAN	4.893	3.267	3.117	1.206	12.483
PBB	792	624	775	131	2.322

Sumber: Kantor Sosial Politik Kota Pekalongan, *Peta Politik Kota Pekalongan Tahun 1999*

Tabel 4. Perolehan Suara PPP, Golkar, dan PKB Pada Pemilu 1997 dan 1999 di Lima Kelurahan, Kecamatan Pekalongan Selatan

Kelurahan	PPP		Golkar		PKB
	1997	1999	1997	1999	1999
Kradenan	3.248 (87,10%)	2.346 (60,77%)	461 (12,36%)	94 (2,44%)	926 (23,99%)
Banyurip Alit	2.050 (91,85%)	325 (13,21%)	165 (7,39%)	34 (1,38%)	1.826 (74,23%)
Banyurip Ageng	2.085 (90,22%)	413 (16,63%)	203 (8,78%)	24 (0,97%)	1.733 (69,77%)
Buaran	1.482 (93,09%)	741 (45,24%)	107 (6,72%)	18 (1,10%)	675 (41,21%)
Jenggot	4.147 (87,62%)	2.948 (61,53%)	554 (11,71%)	145 (3,03%)	1.007 (21,02%)

Sumber: Diolah dari Kantor Sosial Politik Kota Pekalongan, *Peta Politik Kota Pekalongan Tahun 1999*; dan Kantor Sosial Politik Kotamadya Dati II Pekalongan, *Peta Politik Kotamadya Dati II Pekalongan Tahun 1997*.

Kemenangan Warna "Hijau"¹²

Pemilu tahun 2004 di Pekalongan menunjukkan dinamika yang cukup menarik. Bila pada pemilu 1999, PDI-P unggul baik di Kota Pekalongan maupun di Kabupaten Pekalongan, maka pada pemilu 2004, PDI-P mengalami penurunan perolehan suara untuk DPRD Kota dan Kabupaten Pekalongan.

Seperti dijelaskan di atas, kondisi Kabupaten Pekalongan tidak sama persis dengan Kota Pekalongan yang berwarna "hijau". Selama Orde Baru, di Kabupaten Pekalongan justru warna "kuning" yang berkibar terus. Pada pemilu 1992, misalnya

simbol kuning, Golkar, memperoleh 18 kursi, sedangkan PPP hanya 9 kursi. Pada pemilu 1997, walaupun PPP naik menjadi 15 kursi, tetapi Golkar tetap unggul menjadi 20 kursi.

Pada pemilu masa Reformasi, tahun 1999, kondisi berubah. Golkar mengalami "terjun bebas". Mereka hanya memperoleh 4 kursi. Dengan kondisi ini, dominasi warna "kuning" berakhir. Tetapi apakah pemilih di kota santri memilih warna "hijau"? Ternyata tidak. Pada pemilu 1999 yang unggul justru warna "merah" sebagai simbol PDI-P. Mereka mengantongi 17 kursi dari 45 kursi DPRD Kabupaten Pekalongan.

Dari data tersebut, tampaknya masyarakat Kabupaten Pekalongan sampai tahun 1999, belum dapat mempercayakan

¹² Mengingat sampai penulisan ini dibuat, penulis belum memperoleh data hasil pemilu di Kota Pekalongan, maka pembahasan berikutnya akan difokuskan pada pemilu di Kabupaten Pekalongan.

sikap politiknya pada simbol warna "hijau". Padahal Pekalongan dikenal sebagai kota santri.¹³

Tampaknya, labelisasi Pekalongan dengan warna "hijau" dan kota santri itu berkaitan dengan banyaknya pondok pesantren yang ada di sana. Di Kabupaten Pekalongan, jumlah pesantren tidak kurang dari 67 pondok. Di pesantren tersebut, terdapat 13.767 orang santri, dengan rincian: 3.935 santri murni, 8.708 santri tidak murni, dan 1.124 santri musiman. Mereka diasuh oleh 107 Kiai, 44 Nyai, 55 Badal Kiai, 21 Badal Nyai, 356 Ustadz, 194 Ustadzah, 88 Badal Ustadz, dan 70 Badal Ustadzah.¹⁴

Walaupun demikian, pilihan politik mereka, selama Orde Baru, tidak menunjukkan warna "hijau". Warga Kabupaten Pekalongan lebih banyak "memilih" simbol warna "kuning", yaitu Golkar. Kejadian itu menurut seorang narasumber,¹⁵ karena adanya mobilisasi dan target pencapaian suara Golkar. Pada pemilu 1992, misalnya, narasumber tersebut mendapatkan perintah dari Camat untuk memenangkan Golkar dengan suara minimum 60% di tempat kerjanya. Setiap ada kampanye Golkar, dia harus mengerahkan massa minimal 1 truk, ditambah uang saku dan kaos. Narasumber ini merasa tertekan, tetapi tidak berdaya untuk menolak perintah Camat.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa secara nasional, Golkar menggunakan tiga jalur ABG (ABRI, Birokrasi, dan Golkar) untuk memenangkan suara

dalam setiap pemilu. Perintah seorang Camat kepada bawahannya adalah bagian dari jalur birokrasi yang terbukti efektif. Selain jalur birokrasi, di Pekalongan, Golkar menggunakan jalur G, yakni berbagai organisasi *underbow* Golkar. Akibat tekanan yang terus menerus untuk mendukung Golkar, sebagian warga Pekalongan ada yang memprotes. Seperti sudah dijelaskan di depan, ada penolakan yang cukup kuat, terutama di perkotaan, untuk memilih Golkar. Kerusuhan menjelang pemilu 1997 adalah salah satu contoh.

Maka, tidak mengherankan begitu kekuasaan Orde Baru runtuh dan diadakan pemilu tahun 1999, suara Golkar juga ikut runtuh. Pada waktu itu, masyarakat Pekalongan beralih ke warna "merah" sebagai simbol PDIP. Beralihnya masyarakat Pekalongan dari "kuning" ke "merah", akibat kekecewaan mereka, terutama kalangan muda, kepada pemimpin dan tokoh simbol warna "hijau" yang saling bertikai menjelang pemilu tahun 1999.

Kebebasan mendirikan partai politik pasca Orde Baru, telah menyebabkan kalangan warna "hijau" berlomba membuat partai. *Nahdhatul Ulama* (NU) yang menjadi salah satu tulang punggung PPP pada masa Orde Baru, akhirnya membuat partai sendiri, dengan nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dengan berdirinya PKB ini, maka timbul persaingan antara PKB dan PPP dalam memperebutkan suara warga NU. Kerusuhan di Pekalongan menjelang pemilu tahun 1999 berkaitan dengan perebutan tersebut. Warga yang terlibat dalam kerusuhan itu, sebelumnya bernaung dalam satu wadah, yakni PPP.¹⁶

Hasil pemilu tahun 1999 menunjukkan kemenangan simbol warna "merah". Akan tetapi, dominasi warna "merah" tidak dapat berlangsung terus. Pada pemilu tahun 2004, PKB yang bersimbol warna "hijau" memperoleh kursi terbanyak, yakni

¹³ Menurut seorang narasumber, sebenarnya Pekalongan tidak bisa disebut sebagai kota santri yang berlambang warna "hijau". Hal ini menurutnya, karena sejak pemilu tahun 1955 sampai pemilu 1999, partai politik yang bersimbolkan warna "hijau" tidak pernah menang. Pekalongan lebih pas disebut sebagai "abangan" yang pada masa Orde Lama, masyarakatnya lebih memilih PNI dan pada masa Orde Baru, mereka memilih Golkar. Sayangnya, penulis sendiri belum menemukan data lengkap hasil pemilu DPRD di Kabupaten Pekalongan sejak tahun 1955.

¹⁴ Lihat Depag, RI, *Statistical Report of Pondok Pesantren*, Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan, April 2001.

¹⁵ Mantan Kepala Desa pada masa Orde Baru.

¹⁶ Keterangan terinci masalah kerusuhan di Pekalongan menjelang pemilu 1999, antara lain dapat dilihat pada M. Hamdan Basyar, *Ulama dan Kekerasan Politik.....*, hlm.. 159-174.

15 kursi. Jumlah kursi akan bertambah banyak lagi, bila digabungkan dengan partai bersimbol warna "hijau" lainnya, seperti PPP, PBB, maupun PAN. Sedangkan PDI-P memperoleh 13 kursi yang berarti mengalami penurunan perolehan kursi dibandingkan pemilu tahun 1999.

Pada pemilu tahun 2004, Kabupaten Pekalongan dibagi menjadi 5 (lima) daerah pemilihan (DP), yaitu DP 1 (Pekalongan 1) mencakup lima kecamatan, yaitu Petungkriyono, Talun, Karanganyar, Lebakbarang, dan Doro; DP 2 (Pekalongan 2) meliputi tiga kecamatan, yaitu Kajen, Kandang Serang, dan Panninggaran. DP 3 (Pekalongan 3) terdiri dari tiga kecamatan, yaitu: Kesesi, Bojong, dan Sragi; DP 4 (Pekalongan 4) meliputi empat kecamatan, yaitu Wonopringgo, Kedungwuni, Buaran, dan Karang Dadap; DP 5 (Pekalongan 5) mencakup empat kecamatan, yaitu: Tirto, Wiradesa, Siwalan, dan Wonokerto.

untuk menduduki 45 kursi DPRD Kabupaten Pekalongan. Ada 2.046 TPS yang digunakan untuk pemilihan umum. Jumlah pemilih dan TPS di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel 5.

Dari jumlah pemilih tersebut, suara yang dianggap sah hasil pemilu tahun 2004 adalah 433.128 suara (78,44 % dari total pemilih). Persentase jumlah suara sah tertinggi dibandingkan jumlah pemilih adalah di DP 4 (80,25%). Sedangkan persentase jumlah suara sah terendah adalah di DP 3 (74,32%). Sementara itu, persentase suara sah di DP 1 adalah 79,18 %; di DP 2 adalah 79,50%; serta di DP 5 adalah 79,52%. Menurut Ketua KPUD Kabupaten Pekalongan, H. Hasan Bisri, jumlah suara sah pemilih yang rata-rata kurang dari 80% itu akibat adanya salah coblos, rusak, dan pemilih tidak hadir.¹⁷ Perincian berapa yang salah coblos atau rusak maupun pemilih yang tidak hadir, tidak ditemukan datanya.

Tabel 5. Jumlah Pemilih, TPS dan kursi DPRD Pemilu 2004 di Kabupaten Pekalongan

Daerah Pemilihan	Kecamatan	Pemilih	TPS	Kursi DPRD
Pekalongan 1	1. Petungkriyono	7.860	32	
	2. Talun	16.750	60	
	3. Karanganyar	25.254	94	
	4. Lebakbarang	6.783	30	
	5. Doro	23.568	94	
Jumlah Pekalongan 1		80.215	310	7
Pekalongan 2	1. Kajen	36.915	137	
	2. Kandangserang	20.844	76	
	3. Panninggaran	22.943	96	
Jumlah Pekalongan 2		80.702	309	7
Pekalongan 3	1. Kesesi	43.257	160	
	2. Bojong	44.029	175	
	3. Sragi	41.025	144	
Jumlah Pekalongan 3		128.311	479	10
Pekalongan 4	1. Wonopringgo	27.683	100	
	2. Buaran	27.132	95	
	3. Kedungwuni	57.817	209	
	4. Karangdadap	20.393	75	
Jumlah Pekalongan 4		133.025	479	11
Pekalongan 5	1. Tirto	39.309	141	
	2. Wiradesa	37.151	134	
	3. Siwalan	25.768	94	
	4. Wonokerto	27.723	100	
Jumlah Pekalongan 5		129.951	469	10
Total Kabupaten Pekalongan		552.204	2.046	45

Sumber: KPUD Kab. Pekalongan

Jumlah seluruh pemilih yang terdaftar adalah 552.204 pemilih. Suara mereka diperebutkan oleh 24 partai politik

¹⁷ Keterangan diberikan ketika penulis bertemu dengan Ketua KPUD Kab. Pekalongan, pada tanggal 14 Mei 2004, di kantor KPU Kajen, Pekalongan.

Seluruh partai politik yang ikut pemilu tahun 2004 ada perwakilannya di Kabupaten Pekalongan. Hanya saja, tidak seluruh partai politik memperoleh suara di masing-masing DP. Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD) tidak memperoleh suara di DP 1 dan DP 4; Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK) tidak punya suara di DP 3 dan DP 4; Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) tidak ada suara di DP 1 dan DP 2; Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) tidak punya suara di DP 2; Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) tidak memperoleh suara di DP 2 dan DP 3; Partai Damai Sejahtera (PDS) tidak mendapat suara di DP 4; Partai Patriot Pancasila (PP Pancasila) tidak punya suara di DP 2 dan DP 5; serta Partai Persatuan Daerah (PPD) tidak mendapat suara di DP 1. Partai politik yang tidak memperoleh suara dari semua DP itu seluruhnya merupakan partai baru. Beberapa kalangan menduga, ketidakberhasilan partai baru tersebut dikarenakan kekurangan sumber daya dan sosialisasi. Masyarakat sendiri kebingungan melihat betapa banyak partai yang mesti dipilih. Akibatnya, sebagian besar mereka memilih apa yang sudah dikenalnya atau apa yang sudah dipesankan oleh tokoh masyarakat dalam kampanye partai politik.

Bila melihat hasil pemilu, maka terdapat dinamika suara perolehan partai politik di antara masing-masing DP. Secara lengkap hasil pemilu 2004 dan perolehan kursi untuk DPRD Kabupaten Pekalongan, dapat dilihat pada Tabel 6.

Dari Tabel 6 terlihat, bahwa akumulasi jumlah perolehan suara tidak langsung mendapatkan kursi DPRD. Bila dibagi antara total perolehan suara sah dan total perolehan kursi, maka akan terlihat angka yang cukup "aneh". PKB yang memperoleh total 137.776 suara mendapatkan 15 kursi DPRD. Ini bila dibagi, maka satu kursi bernilai 9.185 suara. Nilai satu kursi untuk PDIP 8.691 suara. PPP mendapatkan satu kursi DPRD dengan harga 8.408 suara. Golkar dan PAN memperoleh harga kursi lebih murah

lagi. Golkar dengan 7.944 suara dapat satu kursi, sedangkan PAN hanya dengan 7.657 suara dapat satu kursi DPRD. Hal ini tentu berbeda dengan P. Demokrat yang mempunyai total 13.916 suara, tetapi hanya mendapatkan satu kursi DPRD. Nasib PKS lebih tidak beruntung. Partai yang banyak diminati kalangan muda Islam ini tidak mendapatkan satu kursi pun dalam DPRD Kab. Pekalongan. Padahal mereka memperoleh total 11.410 suara. Sebaliknya, PBB yang mendapatkan total 7.930 suara mendapatkan satu kursi DPRD.

Perolehan kursi DPRD seperti di Tabel 6, karena didasarkan pada perolehan suara partai di masing-masing DP, bukan akumulasi total perolehan suara. Menarik juga dilihat perbandingan perolehan kursi di DP. PPP, misalnya, di DP 1 mendapatkan 3.130 dan mereka tidak memperoleh kursi DPRD. Akan tetapi, PBB di DP 5 yang hanya memperoleh 2.691 suara, mendapatkan satu kursi DPRD. Di DP yang sama (DP 5), PKS yang memperoleh 2.491 suara (selisih 200 suara dari PBB), tidak mendapatkan kursi. Di DP 4, Golkar yang mendapatkan 3.137 suara, bisa memperoleh satu kursi DPRD. Sedangkan Partai Demokrat yang memperoleh 3.106 suara (selisih 31 suara dari Golkar), tidak mendapatkan kursi DPRD dari DP 4.

Memang banyak partai yang mendapatkan kursi DPRD, karena sisa suara di DP yang bersangkutan. Di DP 1 yang memperebutkan 7 kursi, partai yang mendapatkan suara di atas BPP (9.073) hanya tiga partai, yaitu PKB, PDIP, dan Golkar. Di DP 2, partai yang memperoleh suara di BPP (9.165) juga tiga, yaitu PKB, PDIP, dan Golkar. Demikian juga di DP 3, partai yang mempunyai suara di atas BPP (9.537) adalah PKB, PDI-P, dan Golkar. Sedangkan di DP 4, partai yang mendapatkan suara di atas BPP (9.705) adalah PPP, PAN, PKB, dan PDIP. Sementara itu, di DP 5, partai yang mempunyai suara di atas BPP (10.333) adalah PAN, PKB, dan PDIP. Dengan demikian, yang mempunyai suara di atas BPP di semua DP hanyalah PKB dan PDIP.

Tabel 6. Perolehan Suara dan Kursi DPRD Kabupaten Pekalongan Hasil Pemilu 2004

No	Partai Politik	DP 1		DP 2		DP 3		DP 4		DP 5		Total	
		Suara	Kursi	Suara	Kursi	Suara	Kursi	Suara	Kursi	Suara	Kursi	Suara	Kursi
1	PNI Marhaenisme	324	0	243	0	2.157	0	344	0	598	0	3.666	0
2	PBSD	0	0	109	0	853	0	0	0	244	0	1.206	0
3	PBB	1.568	0	279	0	2.275	0	1.117	0	2.691	1	7.930	1
4	P Merdeka	146	0	113	0	456	0	271	0	330	0	1.316	0
5	PPP	3.130	0	5.159	1	4.335	1	12.221	1	8.788	1	33.633	4
6	PPDK	194	0	115	0	0	0	0	0	366	0	675	0
7	PPIB	0	0	0	0	224	0	50	0	187	0	461	0
8	PNBK	154	0	0	0	516	0	539	0	322	0	1.531	0
9	P Dkrat	4.447	1	995	0	2.958	0	3.106	0	2.410	0	13.916	1
10	PKPI	125	0	417	0	292	0	62	0	966	0	1.862	0
11	PPDI	578	0	652	0	1.290	0	327	0	615	0	3.462	0
12	PPNUI	918	0	0	0	0	0	418	0	318	0	1.654	0
13	PAN	4.098	1	4.689	1	5.304	1	11.826	1	12.368	1	38.285	5
14	PKPB	1.136	0	1.261	0	1.240	0	979	0	772	0	5.388	0
15	PKB	14.484	2	13.470	1	23.977	3	54.442	6	31.403	3	137.776	15
16	PKS	1.620	0	2.369	0	2.858	0	2.072	0	2.491	0	11.410	0
17	PBR	455	0	301	0	753	0	742	0	1.152	0	3.403	0
18	PDIP	19.838	2	17.267	2	31.987	4	14.757	2	29.131	3	112.980	13
19	PDS	317	0	83	0	231	0	0	0	332	0	963	0
20	P Golkar	9.690	1	16.263	2	11.289	1	3.137	1	7.285	1	47.664	6
21	PP Pancasila	141	0	0	0	635	0	115	0	0	0	891	0
22	PSI	104	0	214	0	1.173	0	103	0	323	0	1.917	0
23	PPD	0	0	129	0	489	0	92	0	75	0	785	0
24	P Pelopor	46	0	29	0	73	0	39	0	167	0	354	0
	Jumlah	63.513	7	64.157	7	95.365	10	106.759	11	103.334	10	433.128	45
	BPP	9.073		9.165		9.537		9.705		10.333			

Sumber: KPU Kab. Pekalongan

Dari Tabel 6 di atas, terlihat juga bahwa hasil pemilu tahun 2004 menunjukkan warna “hijau” cukup mendominasi DPRD Kabupaten Pekalongan. Bila diamati secara lebih mendalam faksi “hijau” dan gabungan faksi “merah/kuning”, maka terlihat kekuatan mereka cukup seimbang.¹⁸ Di DP 1 dan DP 2, gabungan kekuatan faksi “merah/kuning” lebih banyak dibandingkan dengan faksi “hijau.” Akan tetapi, sebaliknya, di DP 4 dan DP 5, kekuatan faksi “hijau” lebih dominan. Sedangkan di DP 3, kedua kekuatan mempunyai jumlah kursi yang sama. Memang, bila faksi “merah” dan “kuning” dipisah, maka kekuatan faksi “hijau”

unggul di setiap DP. Tabel 7 berikut ini menunjukkan hal itu.

Tabel 7. Kekuatan Kursi DPRD Kab. Pekalongan dari Faksi Merah, Kuning dan Hijau

Faksi	DP1	DP2	DP3	DP4	DP5	Total
Hijau	3	3	5	8	6	25
Kuning	2	2	1	1	1	7
Merah	2	2	4	2	3	13
Total	7	7	10	11	10	45

Sumber: KPUD Kab. Pekalongan

Secara total memang partai yang bisa diberi simbol warna “hijau” lebih banyak, dibandingkan dengan partai dengan simbol warna “merah” maupun “kuning”. Memang, pelabelan ini berdasarkan pada warna “ideologi” yang mereka perjuangkan. Akan tetapi, apakah mereka yang diberi label warna “hijau”, misalnya, akan bersatu dalam perjuangan mereka? Atau apakah warna “merah” akan bisa bersatu dengan warna “kuning”? Hal ini tentunya tidak mudah untuk dijelaskan.

Seringkali suara partai politik dalam realitas kehidupan kesehariannya akan melihat hal-hal yang lebih bersifat pragmatis. Kesamaan warna bisa jadi tidak

¹⁸ Pembagian faksi ini tidak berdasarkan fraksi yang ada dalam DPRD. Faksi yang dimaksud di sini sengaja dilambangkan dengan warna “Merah,” “Kuning,” dan “Hijau.” Warna ini untuk mempermudah berbagai warna yang ada dalam lambang partai politik. Dan ketiga warna itu “sebagai kelanjutan” dari warna yang sudah dikenal selama masa pemerintahan Orde Baru. Faksi “Merah” adalah PDIP; Faksi “Kuning” adalah P Golkar dan P Demokrat; Sedangkan faksi “Hijau” adalah PKB, PAN, PPP, dan PBB.

dapat mempersatukan mereka. Malahan mungkin saja, partai politik yang berwarna beda, dapat bersatu dalam memperjuangkan sesuatu yang sama kepentingannya. Kejadian itu, misalnya, ketika pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan, tahun 2001 lalu. Ketika itu, terjadi persaingan dua kubu. *Pertama*, calon yang diajukan oleh PDIP dan PKB. *Kedua*, calon yang didukung oleh PAN, PPP, Golkar, dan TNI/Polri. Dan persaingan itu dimenangkan oleh kubu PDIP (yang punya 17 kursi) dan PKB (10 kursi). Kursi Bupati diduduki oleh orang PDIP dan kursi Wakil Bupati diduduki oleh orang PKB. Koalisi “merah” dan sebagian “hijau” ini melawan koalisi “kuning” dan sebagian “hijau” lainnya. Terlihat adanya perpecahan antara partai yang punya simbol warna “hijau”. Mereka pecah dan berbeda, karena kepentingan pragmatis yang kebetulan berbeda.

Maka, bukanlah hal yang mustahil, apabila kemenangan partai politik warna “hijau” pada pemilu tahun 2004 ini juga tidak dapat mempersatukan mereka, bila kepentingannya berbeda. Tampaknya kepentingan pragmatislah yang dapat menyatukan partai politik, tanpa melihat latar belakang warna dan simbol mereka.¹⁹ Dengan demikian, sebenarnya simbol warna tidak begitu penting dan tidak diperlukan. Mereka bisa bersatu atau berpisah, demi kepentingan pragmatis, bukan demi simbol warna yang mereka emban.

Dengan mengabaikan simbol warna partai politik, bila kita melihat hasil pemilu tahun 2004, maka akan tampak naik turunnya suatu partai politik. PDIP yang pada tahun 1999, dengan gagahnya “naik ke panggung”, pada tahun 2004 ini, harus mengakui keunggulan PKB. Golkar yang

pada tahun 1999 terpuruk, kini mulai bangkit. Tabel 8 berikut ini menunjukkan naik turunnya kursi DPRD Kabupaten Pekalongan.

Tabel 8. Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan

Partai Politik	1992	1997	1999	2004
PPP	9	15	4	4
Golkar	18	20	4	6
PDI	9	1	0	
TNI/Polri	9	9	5	
PDIP			17	13
PKB			10	15
PAN			4	5
PNI Massa Marhaen			1	0
P Demokrat				1
PBB			0	1
Jumlah	45	45	45	45

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Naiknya PKB dan turunnya PDIP sudah diperkirakan dari sebelum pemilu. Sebelum dan ketika masa kampanye, penulis melihat sendiri bagaimana antusiasme masyarakat Pekalongan terhadap PKB. Pengurus PKB juga terlihat sibuk mempersiapkan hajat lima tahunan ini. Sebaliknya, masyarakat Pekalongan merasakan ketidakpuasan terhadap pemerintah Megawati, yang menjadi simbol PDIP. Masalah ekonomi dirasakan semakin berat oleh mereka, sehingga ada sebagian dari mereka yang merindukan “masa dulu yang aman dan mudah cari uang.” Tidak hanya itu, sebagian masyarakat juga mengkritik beberapa tokoh partai “moncong putih” ini yang duduk di legislatif.²⁰

Ketidakpuasan masyarakat terhadap PDIP dimanfaatkan oleh Golkar. Oleh karenanya, Golkar bisa menambah

¹⁹ Ada benarnya apa yang dikatakan oleh Ketua MUI Kab. Pekalongan, bahwa masyarakat Pekalongan adalah pragmatis dalam menghadapi sesuatu. Menurutnya, walaupun Pekalongan dikenal sebagai kota santri, misalnya, tetapi perjudian dan perbuatan haram lainnya masih marak di sana. Bahkan perjudian ada yang dilakukan di belakang masjid. Wawancara dengan Ketua MUI Kab. Pekalongan, pada bulan Februari 2004.

²⁰ Ketika penulis bertemu dengan Pengurus Cabang PKB, sebelum maupun saat kampanye, mereka terlihat antusias untuk memenangkan pemilu. Berbagai peraga kampanye juga dipersiapkan dengan cukup rapi. Mereka juga memasang target tertentu dalam perolehan pemilu. Sebaliknya, ketika penulis bertemu dengan Pengurus Daerah PDIP, mereka terlihat menanggung beban yang cukup berat. Kritik masyarakat terhadap anggota DPRD dari PDIP, membebani pengurus. Mereka harus berhadapan dengan massa pemilih untuk mempertanggungjawabkan wakil mereka di DPRD.

dua kursi. Menurut narasumber yang mantan Ketua DPD Golkar, suara PDIP dan Golkar itu bagaikan dua balon yang disambung. Bila balon A ditekan dan mengecil, maka balon B membesar. Sebaliknya, bila B ditekan dan mengecil, maka balon A membesar. Hal ini menurutnya, terlihat pada pemilu tahun 1997 dan tahun 1999. Tahun 1997, Golkar memperoleh 20 kursi, sedangkan PDI hanya mendapatkan satu kursi. Tahun 1999, Golkar mengecil menjadi empat kursi, sedangkan PDIP membesar menjadi 17 kursi. Dia meramalkan, pada pemilu 2004 juga demikian. Dan, ramalannya tidak meleset.²¹

Penutup

Kemenangan partai politik yang bersimbolkan warna “hijau” dalam pemilu 2004 tidak serta merta memperlihatkan bahwa mereka akan memperjuangkan berbagai hal yang berkaitan dengan simbol “hijau”, seperti syariat Islam, misalnya. Masyarakat Pekalongan yang pragmatis dan wakil mereka yang juga lebih melihat kepentingan pragmatis, tidak akan begitu peduli pada politik simbol “hijau”. Kalau toh ada yang berjuang untuk kepentingan simbol, maka wakil dari DP 4 yang akan bergerak didukung oleh wakil dari DP 5. Itu pun tingkat keberhasilannya masih dipertanyakan. Hal ini mengingat partai dengan simbol warna “hijau” belum memenangkan kursi DPRD secara mutlak. Mereka hanya sedikit lebih banyak jumlahnya, dibandingkan partai warna “merah” dan “kuning.” Kesolidan mereka juga masih dipertanyakan. Kejadian tahun 2001, ketika pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, masih dapat berulang kembali, pada saat mereka harus memperjuangkan kepentingan kelompoknya.

Dengan demikian, masyarakat Pekalongan masih perlu membuktikan, bahwa mereka pantas menyandang gelar

“kota santri” yang biasanya berlambangkan warna “hijau.” Kemenangan partai politik warna “hijau” belum menjadi bukti kepantasan itu, tanpa perbuatan nyata dalam kehidupan keseharian mereka.

Daftar Pustaka

Basyar, M. Hamdan. *Keamanan Di Wilayah “Sumbu Pendek” : Sebuah Penelitian di Kabupaten Pekalongan*. Depok, Ulinuha Press, 2002.

*Ulama dan Keke-
rasan Politik: Kasus Pemilu 1997
dan 1999 di Pekalongan*. Depok,
Hamra Pustaka, 2004.

BPS Kab. Pekalongan. *Kabupaten Peka-
longan Dalam Angka 2003*.

Depag. RI. *Statistical Report of Pondok
Pesantren*. Jawa Tengah, Kabupaten
Pekalongan, April 2001.

Kantor Sosial Politik Kota Pekalongan.
*Peta Politik Kota Pekalongan Tahun
1999*.

Kantor Sosial Politik Kotamadya Dati II
Pekalongan. *Peta Politik Kotamadya
Dati II Pekalongan Tahun 1997*.

KPUD Kab. Pekalongan. “Penetapan Ca-
lon Terpilih Anggota DPRD Kabu-
paten Pekalongan Hasil Pemilihan
Umum Tahun 2004.” Kajen, 8 Mei
2004.

“Penetapan Per-
olehan Kursi Partai Politik Peserta
Pemilu Anggota DPRD Kabupaten
Pekalongan.” Kajen, 8 Mei 2004.

Tempo Interaktif (Edisi 10/02- 10/Mei/97
dan Edisi 11/02- 17/Mei/97).

²¹ Penulis bertemu dengan narasumber pada waktu kampanye Maret 2004. Kenyataannya hasil pemilu 5 April 2004, Golkar membesar menjadi tujuh kursi DPRD dan PDIP mengecil menjadi 13 kursi. Lihat wawancara dengan mantan Ketua DPD Golkar Kab. Pekalongan, pada Maret 2004.